

**TATA TERTIB / RULES and PROCEDURES**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN ("Rapat")**  
**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS ("The Meeting")**  
**PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH Tbk ("Perseroan")**  
**PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH Tbk ("The Company")**  
**Jakarta, 16 April 2020**  
**Jakarta, 16 April 2020**

<p>PT Bank TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH Tbk ("<b>Perseroan</b>") telah menyusun Tata Tertib sehubungan dengan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("<b>Rapat</b>"), yang berlaku bagi Para Pemegang Saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek, PT Datindo Entrycom ("<b>BAE</b>") per tanggal 23 Maret 2020 pukul 16.15 WIB ("<b>Tanggal Pencatatan</b>").</p>	<p>PT Bank TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH Tbk (the "<b>Company</b>") has compiled this Rules and Procedures in connection with the Annual General Meeting of Shareholders ("<b>Meeting</b>"), which applies to Shareholders of the Company as listed in the Shareholders Registry of the Company issued by Securities Administration Bureau, <b>PT Datindo Entrycom ("BAE")</b> as of 23 March 2020 at 16:15 West Indonesia Time ("<b>Recording Date</b>").</p>
<p><b>RUJUKAN DAN DASAR HUKUM</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("<b>UUPT</b>").</li> <li>2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 sebagaimana telah diubah berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.04/ 2017 tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("<b>POJK-32</b>").</li> <li>3. Anggaran Dasar Perseroan.</li> <li>4. Pengumuman dan Pemanggilan Perseroan yang telah dilakukan masing-masing melalui surat kabar harian Bisnis Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia ("<b>BEI</b>"), situs web Otoritas Jasa Keuangan ("<b>OJK</b>") dan situs web Perseroan, berturut-turut pada tanggal 9 Maret 2020 dan 24 Maret 2020.</li> <li>5. Pernyataan Organisasi Kesehatan Dunia bahwa Corona Virus 2019 (COVID-19) adalah pandemi.</li> <li>6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease (COVID-19).</li> <li>7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tanggal 31 Maret 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).</li> </ol>	<p><b>REFERENCES AND LEGAL BASIS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. The Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies (the "<b>Company Law</b>").</li> <li>2. Regulation of the Financial Services Authority No. 32/POJK.04/2014 as amended by the Regulation of the Financial Services Authority No. 10/POJK.04/2017 concerning the Plan and Implementation of the General Meeting of Shareholders of Public Companies ("<b>POJK-32</b>").</li> <li>3. The Articles of Association of the Company;</li> <li>4. The Company's Announcement and Notice which have been published respectively through the <i>Bisnis Indonesia</i> daily newspaper, the Indonesia Stock Exchange ("<b>IDX</b>") website, the Financial Services Authority ("<b>OJK</b>") website and the Company's website, respectively on 9 March 2020 and 24 March 2020.</li> <li>5. The statement of World Health Organization (WHO) that Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) is a pandemic.</li> <li>6. Presidential Decree of the Republic of Indonesia Number 11 of 2020 concerning Establishment of Public Health Emergency for Corona Virus Disease (COVID-19).</li> <li>7. Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 21 of 2020 dated 31 March 2020 concerning Large-Scale Social Restrictions in the Context of Accelerating the Handling of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).</li> </ol>

## **PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19**

Dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku di Pasar Modal serta Kebijakan Pemerintah mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar, protokol kesehatan serta keselamatan gedung tempat Rapat akan diselenggarakan, ketentuan menjaga jarak fisik dan penyelenggaraan Rapat yang efektif dan efisien, maka:

### **1. Protokol Kesehatan dan Keamanan**

Setiap Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham berkenan mengikuti prosedur kesehatan dan keamanan yang ditetapkan oleh Perseroan dan Pihak Pengelola Gedung dimana Rapat diselenggarakan, yaitu wajib melakukan:

- Pemeriksaan suhu tubuh;
- Penyerahan pernyataan kesehatan;
- Prosedur sterilisasi pencegahan Covid-19 yang diperlukan (desinfektan)

Perseroan dan pengelola gedung tidak bertanggung jawab atas dampak dari pelaksanaan prosedur ini, karenanya bagi penderita alergi kulit, asma dan/atau wanita yang sedang hamil dapat dikecualikan, dengan menyerahkan bukti yang cukup kepada petugas.

Perseroan akan menyediakan cairan sanitasi tangan, masker dan sarung tangan bagi Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham yang hadir dalam Rapat.

### **2. Pembatasan Peserta Rapat**

- Perseroan mengimbau dengan sangat agar Pemegang Saham tidak menghadiri Rapat secara fisik, akan tetapi, memberikan kuasa kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan.**
- Perseroan telah menunjuk Pihak Independen yang dapat menerima kuasa, untuk bertindak dan mewakili Pemegang Saham dalam menyampaikan suara dan pertanyaan yang diberikan oleh Pemegang Saham.
- Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan adalah Konsultan Hukum pada kantor hukum **HWMA Law Firm**, yang beralamat di ITS Tower 8th & 9th Floor, Nifarro Park, Jl Raya Pasar Minggu Km 18, Jakarta 12510, selaku Konsultan Hukum independen dan profesional yang telah terdaftar sebagai Konsultan Hukum Pasar Modal di OJK.
- Perseroan akan mengatur sedemikian rupa sehingga jumlah kehadiran secara fisik dalam setiap Ruang Rapat tetap memperhatikan

## **PREVENTION OF COVID-19 SPREADS**

*With regard to the provisions applicable in the Capital Market as well as Government Regulation regarding Large Scale Social Restrictions, health and safety protocols of the building where the meeting will be held, the provisions of maintaining physical distancing and the effectiveness and efficiency of conducting the Meetings, therefore:*

### **1. Health and Safety Protocol**

*Each Shareholder and Shareholder's Proxy shall be willing to go through the health and safety procedures determined by the Company and the Building Management where the Meeting is held, that includes:*

- *Examination of body temperature;*
- *Submission of health statements;*
- *The necessary sterilization procedure for Covid-19 prevention (disinfectant)*

*The Company and the building management are not responsible for the impact of this procedures, therefore for people with skin allergies, asthma and/or women who are pregnant shall be excluded, by submitting sufficient evidence to the officer.*

*The Company will provide hand sanitation liquids, masks and gloves for Shareholders and Shareholders' Proxy who are present at the Meeting.*

### **2. Restrictions on Meeting Participants**

- The Company strongly urges Shareholders not to attend the Meeting physically, and instead, to grant the power of attorney to the Independent Party appointed by the Company.***
- The Company has appointed an Independent Party who can be authorized to act and represent the Shareholders in casting votes and asking questions provided by the Shareholders.*
- The Independent Party appointed by the Company is a Legal Consultant of **HWMA Law Firm**, having its address at ITS Tower 8<sup>th</sup> & 9<sup>th</sup> Floor, Nifarro Park, Jl Raya Pasar Minggu Km 18, Jakarta, 12510, as an independent and professional Legal Consultant who has been registered as the Capital Market Legal Consultant of the OJK.*
- The Company will arrange such that the number of physical attendances in each Meeting Room shall maintain Physical Distancing procedure (2*

ketentuan tentang jarak fisik (berjarak 2 meter tiap tempat duduknya)

Jumlah Peserta Rapat tersebut sudah termasuk dengan kehadiran perwakilan anggota Dewan Komisaris, perwakilan Dewan Pengawas Syariah, perwakilan anggota Direksi, Notaris, BAE, Pemegang Saham dan Kuasa Pemegang Saham, serta para Petugas Rapat.

Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah lainnya, serta perwakilan dari Akuntan Publik tidak semuanya dapat hadir secara fisik dalam Rapat dan akan bergabung melalui fasilitas video konferensi yang ditetapkan Perseroan.

### 3. Transparansi

Memperhatikan aspek transparansi dan dalam hubungannya dengan pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik:

- a. Perseroan memberikan informasi tambahan untuk setiap mata acara Rapat yang lebih terperinci dan rancangan persetujuan yang akan diusulkan kepada Rapat, yang akan dilengkapi dan diunggah dalam website Perseroan, sehingga penjelasan Perseroan melalui Rapat akan diberikan secara singkat dan padat.
- b. Pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan mata acara Rapat, yang diajukan oleh Pemegang Saham yang memberikan kuasa kepada Pihak Independen dan telah tervalidasi, akan dibacakan dan dibahas dalam Rapat, hal mana akan dituangkan dalam Akta Notaris dan disampaikan kepada BEI dan OJK, serta diumumkan dalam situs web Perseroan dan BEI.
- c. **Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada Pihak Independen Perseroan dan telah tervalidasi sebagai pemegang saham yang sah oleh BAE :**
  - Sesuai Pemanggilan Rapat, Pemegang Saham dapat mengajukan pertanyaan melalui Pihak Independen yang ditunjuk Perseroan paling lambat 3 hari sebelum Rapat, yaitu paling lambat tanggal 13 April 2020 dan lembar pertanyaan tersebut dilekatkan pada Surat Kuasa

*meters apart per seat).*

*The number of Participants in the Meeting has included the presence of representatives of members of the Board of Commissioners, representatives of the Sharia Supervisory Board, representatives of members of the Board of Directors, Notaries, Registrars, Shareholders and Shareholders' Authorities, and Meeting Officers*

*Members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners and other members of the Sharia Supervisory Board, as well as representatives from the Public Accountant are not physically present at the Meeting and will join through the video conference facility provided by the Company.*

### 3. Transparency

*With respect to the transparency aspect and in relation to the implementation of Good Corporate Governance:*

- a. *The Company provides more detailed additional information for each agenda item and the draft approval that will be proposed to the Meeting, which will be completed and uploaded on the Company's website, so that the Company's explanation in the Meeting will be given briefly and concisely;*
- b. *The Question related to the agenda of the Meeting, submitted by Shareholders authorizing an Independent Party and validated, will be read out and discussed at the Meeting, and which will be stated in a Notarial Deed and submitted to the IDX and OJK, and announced on the Company's website and IDX.*
- c. ***Shareholder who has granted the authority to the Independent Party and has been validated by BAE as valid Shareholders:***
  - *Pursuant to the Notice of the Meeting, Shareholders are able to submit questions through an Independent Party appointed by the Company no later than 3 days before the Meeting, which is at the latest April 13, 2020 and the sheets of paper containing the questions shall be attached in the Power of Attorney.*

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa tersebut tetap dapat memantau jalannya Rapat melalui video conference yang ditentukan oleh Perseroan;</li> <li>• Akses fasilitas video conference tersebut dapat diperoleh melalui Pihak Independent yang ditunjuk Perseroan melalui email ke: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="mailto:punia@hwamalaw.com">punia@hwamalaw.com</a> dan</li> <li>• <a href="mailto:anas@hwamalaw.com">anas@hwamalaw.com</a></li> </ul> dengan tembusan kepada: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="mailto:dm@datindo.com">dm@datindo.com</a> dan</li> <li>• <a href="mailto:corsec@btpnsyariah.com">corsec@btpnsyariah.com</a></li> </ul> </li> </ul> <p>dengan menyebutkan subjek email : (Proxy ke HWMA) Permintaan Akses ke Video Konferensi RUPST BTPN Syariah 2020</p> <p>serta menyebutkan nama pemegang saham/rekening dan jumlah saham yang dimiliki.</p> <p><b>4. Biaya-biaya</b></p> <p>Pemegang Saham tidak akan dikenai biaya terkait dengan kuasa yang diberikan kepada Pihak Independen yang ditunjuk oleh Perseroan. Namun demikian biaya pengiriman surat kuasa, meterai dan biaya data karena penggunaan video konferensi untuk mengakses Rapat menjadi tanggungan masing-masing Pemegang Saham.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>The Shareholders who have granted the authority can still continue to monitor the proceedings of the Meeting through a video conference provided by the Company;</i></li> <li>• <i>Such Access to the video conference facilities can be obtained through Independent Parties appointed by the Company via email to:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="mailto:punia@hwamalaw.com">punia@hwamalaw.com</a> and</li> <li>• <a href="mailto:anas@hwamalaw.com">anas@hwamalaw.com</a></li> </ul> <i>With a copy to:</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="mailto:dm@datindo.com">dm@datindo.com</a> and</li> <li>• <a href="mailto:corsec@btpnsyariah.com">corsec@btpnsyariah.com</a></li> </ul> </li> </ul> <p><i>with the subject of the email: (Proxy to HWMA) Request Video Conference Access to BTPN Syariah AGMS for 2020</i></p> <p><i>and mention the name of shareholders / accounts and the number of shares owned.</i></p> <p><b>4. Costs</b></p> <p><i>Shareholders will not be charged fees associated with the authority granted to an Independent Party appointed by the Company. However, the cost of sending the power of attorney, stamp duty and data costs from using video conferencing to access the Meeting is the responsibility of each Shareholder</i></p>
<p><b>PERSIAPAN RAPAT</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemegang Saham dianggap telah membaca dan menyetujui isi Tata Tertib ini serta membaca bahan dan Penjelasan Rapat terlebih dahulu yang telah diunduh di Situs Web Perseroan.</li> <li>2. Pemegang Saham yang akan memberikan Kuasa kepada Pihak Independen, diwajibkan <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Sesuai Pemanggilan Rapat, Formulir Surat Kuasa dapat diperoleh dari situs web Perseroan yaitu <a href="http://www.btpnsyariah.com/HubunganInvestor/RUPS2020/formulir_surat_kuasa">www.btpnsyariah.com/HubunganInvestor/RUPS2020/ formulir surat kuasa</a>) atau diperoleh di Kantor Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan, yakni PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No.28 Jakarta 10120;</li> <li>b. Dokumen identitas diri yang harus dilengkapi adalah: <p><u>Untuk Pemegang Saham Perorangan:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kartu Tanda Penduduk ("KTP") atau bukti identitas diri lainnya.</li> </ul> </li> </ol> </li> </ol>	<p><b>MEETING PREPARATION</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Shareholders are deemed to have read and agreed to the contents of this Rules and Procedures of the Meeting and to have read the materials and the Explanation of the Meeting in advance that can be downloaded on the Company's Website</i></li> <li>2. <i>Shareholders who authorize the Independent Party, is required:</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>In accordance with the Meeting Notice, the Power of Attorney Form can be obtained from the Company's website (www.btpnsyariah.com/ Investor Relations / AGMS 2020 / power of attorney form) or obtained at the Company's Share Registrar (BAE), namely PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No.28 Jakarta 10120.</i></li> <li>b. <i>Identification documents which have to be completed are:</i> <p><i>For Individual Shareholders:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Identity Card ("KTP") or other proof of identity.</i></li> </ul> </li> </ol> </li> </ol>

<p><u>Untuk Pemegang Saham Badan Hukum atau Kuasa Pemegang Saham Badan Hukum:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fotokopi Anggaran Dasar Perusahaan yang terakhir;</li> <li>• Fotokopi Akta Pengangkatan Susunan Pengurus Perusahaan yang terakhir; dan</li> <li>• Surat kuasa khusus (apabila diperlukan oleh Anggaran Dasar Badan Hukum dimaksud).</li> </ul> <p>c. Asli Surat Kuasa wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada BAE melalui alamat sebagai berikut:</p> <p>PT Datindo Entrycom Jalan Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120 u.p. Data Management Department</p> <p>Surat kuasa tersebut paling lambat diterima oleh BAE dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat, yakni tanggal 13 April 2020.</p> <p>Dan menyampaikan salinan Surat Kuasa beserta salinan identitas diri/perusahaan kepada</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="mailto:punia@hwamalaw.com">punia@hwamalaw.com</a> and</li> <li>• <a href="mailto:anas@hwamalaw.com">anas@hwamalaw.com</a> and</li> <li>• <a href="mailto:dm@datindo.com">dm@datindo.com</a> and</li> <li>• <a href="mailto:corsec@btpnsyariah.com">corsec@btpnsyariah.com</a></li> </ul> <p>dengan menyebutkan subjek email: <b>RUPST BTPN Syariah tahun 2020</b> dalam waktu 3 (tiga) hari sebelum Rapat atau terakhir tanggal 13 April 2020.</p> <p>d. Hanya Surat Kuasa yang diberikan oleh Pemegang Saham yang telah divalidasi oleh BAE, yang berhak hadir dalam Rapat, yang akan dihitung baik kuroum maupun Suara yang diambil.</p> <p>Pertanyaan yang diajukan oleh Penerima Kuasa akan dibaca dalam Rapat. Pembahasan mata acara Rapat termasuk pertanyaan yang diajukan akan dicatat oleh Notaris dan diumumkan dalam situs web Perseroan dan BEI.</p>	<p><u>For Legal Entity Shareholders or Legal Entity Shareholder Proxies:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Photocopy of the latest Company's Articles of Association;</li> <li>• Photocopy of deed of appointment of the latest company management; and</li> <li>• Specific power of attorney (if required by the Articles of Association of the Legal Entity).</li> </ul> <p>c. The original power of attorney must be submitted in person or by registered letter to BAE with the following address:</p> <p>PT Datindo Entrycom Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120 u.p. Data Management Department</p> <p>The power of attorney is received by BAE no later than 3 (three) days before the date of the Meeting, namely 13 April 2020.</p> <p>And submit a copy of the Power of Attorney, along with the copy of individual/company identification to</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <a href="mailto:punia@hwamalaw.com">punia@hwamalaw.com</a> and</li> <li>• <a href="mailto:anas@hwamalaw.com">anas@hwamalaw.com</a> and</li> <li>• <a href="mailto:dm@datindo.com">dm@datindo.com</a> and</li> <li>• <a href="mailto:corsec@btpnsyariah.com">corsec@btpnsyariah.com</a></li> </ul> <p>By mentioning the subject of the email: <b>BTPN Syariah AGM 2020</b> within 3 (three) days before the Meeting, namely 13 April 2020.</p> <p>d. Only the Shareholders Proxy granted by the Shareholders that have been validated by the Share Registrar, have the right to attend the Meeting and will be counted in the Quorum and for the vote casted.</p> <p>As for questions raised will be read at the Meeting. Discussion on the agenda of the Meeting, including questions raised, will be noted by the Notary Public and announced on the Company's and IDX websites.</p>
<p><b>PROSES REGISTRASI</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan hadir dalam Rapat wajib mengikuti protokol standar kesehatan dan keamanan sebagaimana dijelaskan sebelumnya;</li> <li>2. Proses pendaftaran akan berlangsung dari pukul 09.00 WIB dan ditutup pada pukul 09.50 WIB. <b>Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang</b></li> </ol>	<p><b>REGISTRATION PROCESS</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Shareholders or Shareholders' Proxies who will attend the Meeting, must follow the health and safety standard protocol as explained earlier;</li> <li>2. The registration process will take place from 09.00 WIB and closed at 09.50 WIB. <b>Shareholders or Shareholders' Proxies who attend after 10:00</b></li> </ol>

<p><b>Saham yang hadir setelah pukul 10.00 WIB, tidak diperkenankan untuk hadir dalam Rapat, dan oleh karenanya tidak dapat memberikan Suara atau pertanyaan dalam Rapat;</b></p> <p>3. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang akan hadir wajib membawa dokumen berupa:</p> <p>a. Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia diminta untuk memperlihatkan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat ("KTUR") yang dapat diperoleh di perusahaan efek atau bank kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya;</p> <p>b. Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham Perorangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• KTP atau bukti identitas diri lainnya;</li> <li>• Surat Kuasa dan KTP atau bukti identitas lainnya dari Pemberi dan Penerima Kuasa.</li> </ul> <p>c. Pemegang Saham Badan Hukum atau Kuasa Pemegang Saham Badan Hukum:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fotokopi Anggaran Dasar perusahaan yang terakhir;</li> <li>• Fotokopi akta Pengangkatan Susunan Pengurus perusahaan yang terakhir;</li> <li>• Surat kuasa khusus (apabila diperlukan oleh Anggaran Dasar Badan Hukum dimaksud).</li> </ul> <p>4. Untuk menjalankan protokol kesehatan dan keamanan, Perseroan akan memperhatikan kapasitas Ruang Rapat dan untuk selanjutnya berhak meminta Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham yang hadir untuk mengikuti Rapat di ruangan yang terpisah dari ruang utama Rapat (dalam hal diperlukan);</p> <p>5. Peserta Rapat hanya diperkenankan membawa barang pribadi yang dipandang wajar untuk dapat dibawa ke ruang Rapat.</p> <p>6. Seluruh alat komunikasi pribadi (termasuk telepon selular) agar dinon-aktifkan atau di set pada nada getar selama Rapat berlangsung.</p>	<p><b><i>WIB, are not permitted to attend the Meeting, and therefore cannot vote or raise question in the Meeting.</i></b></p> <p>3. <i>Shareholders or Shareholders' Proxy who will be present must provide documents as follows:</i></p> <p>a. <i>Shareholders whose shares are in the collective custody of the Indonesian Central Securities Depository are requested to show Written Confirmation for Meetings ("KTUR") which can be obtained at a securities company or custodian bank where the Shareholders maintain their securities accounts;</i></p> <p>b. <i>Shareholders or Individual Shareholder's Proxy:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>KTP or other proof of identity;</i></li> <li>• <i>Power of Attorney and KTP or other proof of identity from the Principal and Attorney of Power of Attorney;</i></li> </ul> <p>c. <i>Legal Entity Shareholders or the Attorney of Legal Entity Shareholder:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Photocopy of the latest Company's Articles of Association;</i></li> <li>• <i>Photocopy of deed of appointment of the latest company management;</i></li> <li>• <i>Specific power of attorney (if required by the Articles of Association of the Legal Entity).</i></li> </ul> <p>4. <i>In order to implement the health and safety protocol, the Company will consider the capacity of the Meeting Room and henceforth has the right to ask the attending Shareholders or Shareholders' Proxy to follow the Meeting in a room separated from the main room of the Meeting (if necessary);</i></p> <p>5. <i>Meeting Participants are only permitted to bring personal belongings that are reasonable to bring long to the Meeting room</i></p> <p>6. <i>All personal communication devices (including cellular phones) must be deactivated or in vibrate mode settings during the Meeting.</i></p>
---	--

## **PELAKSANAAN RAPAT**

### **1. Mata Acara Rapat**

Mata Acara Rapat dan penjelasannya adalah sebagaimana telah dijelaskan dalam Pemanggilan Rapat melalui surat kabar harian Bisnis Indonesia, situs web Perseroan dan BEI dan situs web OJK tanggal 24 Maret 2020 dan Informasi Tambahan yang tersedia pada Situs Web Perseroan

### **2. Ketua Rapat**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (1) POJK-32 juncto Pasal 10 ayat 16 Anggaran Dasar Perseroan, Rapat akan diketuai oleh Komisaris Utama Perseroan yang telah ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan, yakni Bapak Kemal Azis Stamboel yang akan hadir secara fisik, dan dalam hal Komisaris Utama berhalangan hadir, tanpa perlu dibuktikan kepada pihak manapun, maka sesuai Anggaran Dasar, ketua Rapat akan dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Komisaris Utama.

### **3. Kuorum Rapat**

Rapat sah dan berhak mengambil keputusan sah dan mengikat jika dalam Rapat dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sesuai dengan Pasal 26 POJK-32 juncto Pasal 11 ayat 1.a Anggaran Dasar juncto Pasal 86 ayat (1) UUPT

Kecuali Mata Acara Ke-5 berkenaan dengan perubahan Anggaran Dasar, Rapat sah dan berhak mengambil keputusan sah dan mengikat jika dalam Rapat dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan sesuai dengan Pasal 27 POJK-32 juncto Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar.

### **4. Tanya Jawab**

- a. Sebelum pengambilan keputusan Mata Acara Rapat, Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada para pemegang saham dan wakil para pemegang saham yang hadir dalam Rapat untuk mengajukan pertanyaan dalam setiap mata acara Rapat. Pemegang saham atau wakil pemegang saham yang

## **PROCEEDING OF THE MEETING**

### **1. The Agenda of The Meeting**

*The Meeting Agenda and its explanation are as elaborated in the Meeting Notice in the *Bisnis Indonesia* daily newspaper, the Company's website and IDX and the OJK website dated 24 March 2020 and Additional Information which are available on the Company's website;*

### **2. The Chairman Of The Meeting**

*According to Article 22 paragraph (1) of the POJK-32 in conjunction with Article 10 paragraph 16 of the Articles of Association, the Meeting shall be chaired by the President Commissioner of the Company who had been appointed by the the Board of Commissioners of the Company, namely Mr. Kemal Azis Stamboel who will be attended the Meeting physically, and in the event that the President Commissioner is unable to attend, without the need to prove it to any party, then according to the Articles of Association, the Meeting will be chaired by a member of Board of Commissioners appointed by the President Commissioner*

### **3. The Quorum Of The Meeting**

*The meeting is legitimate and entitled to passing legitimate and binding resolution if the meeting is attended by the shareholders or their shareholder proxy that in total represent ½ (one half) of the total number of shares with legitimate voting rights that had been issued by the Company according to Article 26 POJK-32 in conjunction with Article 11 paragraph (1) letter (a) of the Articles of Association in conjunction with Article 86 paragraph (1) UUPT.*

*Except for the Fifth Agenda Item concerning the Amendment of the Articles of Association, the Meeting is legitimate and entitled to passing a legitimate and binding resolution if the Meeting is attended by the shareholders or their shareholder proxy that in total represent at least 2/3 (two third) of the total number of shares with legitimate voting rights that had been issued by the Company according to Article 27 POJK-32 in conjunction with Article 12 paragraph (1) of the Articles of Association.*

### **4. Question And Answer**

- a. *Before passing a resolution for each agenda item of the Meeting, the Chairman of the Meeting shall give the opportunity for the shareholders and the shareholder proxy who attend the Meeting to ask question for each agenda item of the Meeting. The shareholder or the shareholder proxy*

<p>ingin mengajukan pertanyaan diminta untuk mengangkat tangan.</p> <p>b. Pertanyaan agar dibacakan melalui pengeras suara yang akan diserahkan Petugas. Bagi pemegang saham yang akan mengajukan pertanyaan, mohon menyebutkan /menuliskan nama, perusahaan yang diwakili dan jumlah saham yang dimiliki.</p> <p>c. Pertanyaan harus berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan. Pertanyaan yang menurut pendapat Ketua Rapat tidak berhubungan langsung dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan, tidak akan dijawab. Pertanyaan agar diajukan secara singkat dan jelas.</p> <p>Pertanyaan Penerima Kuasa yang termuat dalam lembaran yang dilekatkan pada Surat Kuasa akan dibacakan oleh Petugas</p> <p>d. Ketua Rapat atau orang yang ditunjuk oleh Ketua Rapat akan menjawab pertanyaan yang berhubungan langsung dengan mata acara Rapat. Pertanyaan yang sama maksudnya akan dijawab sekaligus.</p>	<p><i>intending to ask question shall be asked to raise their hand.</i></p> <p><i>b. The question shall be read through a microphone distributed by the Officer. The shareholder intending to aske a question shall mention/write the name, the company represented and the number of shares owned.</i></p> <p><i>c. The question must be directly related to the agenda item of the Meeting being discussed. Any question, that according to the Chairman of the Meeting is not directly related to the agenda item of the Meeting being discussed, will not be addressed. The question shall be clear and concise.</i></p> <p><i>The questions of the Attorney written in the sheet of paper attached in the Power of Attorney shall be read out by the Officer.</i></p> <p><i>d. The Chairman of the Meeting or the person appointed by the Chairman of the Meeting shall answer the question that is directly related to agenda item of the meeting. Other question with similar meaning will be addressed at once.</i></p>
<p><b>5. Tata Cara Pemungutan Suara</b></p> <p>a. Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat 6 Anggaran Dasar, pemungutan suara mengenai setiap acara rapat dilakukan secara lisan, kecuali jika ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam Rapat yang memiliki saham dalam Perseroan dalam jumlah paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan oleh Perseroan.</p> <p>b. Pemungutan suara dilakukan setelah seluruh pertanyaan selesai dijawab dan/atau waktu tanya jawab berakhir.</p> <p>c. Pemungutan suara dilakukan secara lisan sebagai berikut:</p> <p>Ketua Rapat akan meminta kepada para pemegang saham dan wakil para pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain terhadap usul yang diajukan untuk mengangkat tangan masing-masing.</p> <p>Untuk memudahkan penghitungan, para pemegang saham dan wakil para pemegang saham yang menyatakan tidak setuju atau abstain</p>	<p><b>5. The Procedures Of The Voting</b></p> <p><i>a. According to the Article 11 paragraph 6 of the Articles of Association, the voting for each agenda item of the meeting shall be administered in oral, unless otherwise decided by the Chairman of the Meeting without any objections from the shareholders attending the Meeting with the ownership of the Company shares of at least 5% (five percent) of the total shares with the voting rights that had been issued by the Company.</i></p> <p><i>b. The voting shall be administered after all the questions are completely addressed and/or the question and answer time is finished.</i></p> <p><i>c. The procedures of the Oral Voting is as follows :</i></p> <p><i>The Chairman of the Meeting will ask the shareholders and the shareholder proxy who state disagreement or abstention to the proposal being discussed to raise their hands.</i></p> <p><i>In order to facilitate the calculation, the shareholders and the shareholder proxy stating disagreement or abstention to the proposal being</i></p>

terhadap usul yang diajukan dimohon agar mengangkat tangan, mencatat namanya dan jumlah suara yang dikeluarkan dalam "kartu suara" dan dimasukkan ke kotak suara.

BAE dan Petugas dari Notaris akan mengumpulkan "kartu suara" yang telah diisi, juga memeriksa suara yang tercantum dalam Surat Kuasa untuk kemudian dihitung. Notaris akan melaporkan hasil perhitungan kepada Ketua Rapat

Catatan:

Berdasarkan Pasal 30 POJK-32, pemegang saham yang mengeluarkan suara abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara

- d. Para pemegang saham dan wakil para pemegang saham yang **tidak** mengangkat tangan dianggap menyetujui usul yang diajukan.
- e. Jika jumlah suara yang tidak menyetujui ternyata tidak signifikan, Ketua Rapat berhak untuk menyatakan bahwa usul yang diajukan disetujui oleh Rapat. Keputusan Ketua Rapat mengenai hal ini mengikat.

## 6. Keputusan

- a. Keputusan atas usul yang diajukan dalam suatu agenda Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
- b. Jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan sah jika disetujui oleh lebih dari ½ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) POJK-32 juncto Pasal 26 ayat (1) c POJK-32 juncto Pasal 87 ayat 2 Undang-undang PT 2007 juncto Pasal 11 ayat 7 Anggaran Dasar.

Sedangkan untuk Mata Acara Rapat ke-5 berkenaan dengan perubahan Anggaran Dasar, keputusan sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat sesuai dengan Pasal 27 POJK-32 juncto Pasal 12 ayat 1 Anggaran Dasar.

*discussed are asked to raise their hands, write their names and the number of votes casted in the "Voting Card" and put into the ballot box.*

*BAE and The staff of the Notary will collect the filled "Voting Card", and examine the votes stated in the Power of Attorney to be calculated. The Notary will then report the result of the calculation to the Chairman of the Meeting.*

*Note:*

*According to Article 30 POJK-21, the the shareholder with abstained vote (does not cast vote) is considered to cast vote that is the same as the majority votes of the shareholders who vast votes.*

- d. Shareholder or shareholder proxy who **does not** raise hand is considered in agreement to the proposal being discussed.*
- e. If the number of votes disapproving turns out to be insignificant, the Chairman of the Meeting has the right to state that the proposal is approved by the Meeting. Decisions of the Chairman of the Meeting regarding this matter are binding.*

## 6. The Resolution Of the Meeting

- a. The resolution for the proposal being discussed in the agenda item of the Meeting shall be passed by deliberation for mutual consensus.*
- b. Should the mutual consensus is not reached, the resolution will be legitimate if it is agreed by more than ½ (one half) of the total number of shares with voting rights that are present or represented in the Meeting according to Article 25 paragraph (1) POJK-32 in conjunction with Article 26 paragraph (1) letter (c) POJK-32 in conjunction with Article 87 paragraph (2) of the Law of Limited Liabilities Company 2007 in conjunction with Article 11 paragraph 7 of the Articles of Association.*

*Whereas for the Fifth Agenda Item of the Meeting concerning the Amendment of the Articles of Association, the resolution is legitimate if it is agreed by more than 2/3 (two third) of the total number of shares with voting rights that are present or represented in the Meeting according to Article 27 POJK-32 in conjunction with Article 12 paragraph (1) of the Articles of Association.*

<p><b>LAIN-LAIN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bahasa Rapat Pada prinsipnya, Rapat diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia;</li> <li>2. Para Undangan yang hadir dalam Rapat, tidak mempunyai hak mengeluarkan pendapat (kecuali jika diminta oleh Ketua Rapat) atau mengeluarkan suara dalam Rapat.</li> </ol>	<p><b><i>OTHERS</i></b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. The meeting is in principle to be held in Indonesian language;</li> <li>2. The invitees attending the Meeting, do not have the right to state opinion (unless otherwise requested by the Chairman of the Meeting) or cast vote in the Meeting.</li> </ol>
<p>Jakarta, 16 April 2020 PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH Tbk Direksi</p>	<p>Jakarta, 16 April 2020 PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH Tbk. <i>Board of Directors</i></p>